



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Sekretariat: Jl. Muara Karya No. 10 Kel. Kamalapati, Kec. Kota Waingapu
Laman: sumbatimur.bawaslu.go.id

Nomor : 075/HM.00.02/K.NT-09/11/2024
Tanggal : 22 November 2024

SIARAN PERS

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Sumba Timur Petakan 24 Indikator Potensi TPS Rawan

Bawaslu Sumba Timur petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 8 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 12 indikator yang tidak banyak terjadi, dan 4 indikator yang sama sekali tidak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 24 indikator, diambil dari 507 TPS, 156 kelurahan/desa di 22 Kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA dan ujaran kebencian. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

8 (Delapan) Indikator TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 326 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;
- 2) 164 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
- 3) 135 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
- 4) 92 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);
- 5) 68 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di

- luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 6) 101 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);
 - 7) 22 TPS yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 - 8) 73 TPS yang Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);

12 (Dua Belas) Indikator TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi

- 1) 6 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
- 2) 3 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;
- 3) 6 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;
- 4) 1 TPS yang dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 5) 5 TPS yang terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang;
- 6) 10 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
- 7) 8 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
- 8) 5 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
- 9) 5 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
- 10) 1 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
- 11) 1 TPS yang Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
- 12) 10 TPS yang ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;

3 (Tiga) indikator TPS Rawan yang Sama Sekali Tidak Terjadi

- 1) 0 TPS yang terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);
- 2) 0 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS;
- 3) 0 TPS yang Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara;

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Sumba Timur, KPU Sumba Timur, Pasangan Calon, Pemerintah Sumba Timur, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh Sumba Timur untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Sumba Timur melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu Sumba Timur juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Sumba Timur merekomendasikan KPU Sumba Timur untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

VARIABEL	INDIKATOR	JUMLAH TPS RAWAN	TPS RAWAN PALING BANYAK (KECAMATAN)
Penggunaan Hak Pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);	92	Umalulu, Lewa, pandawai, Kahaungu Eti, Pahunga Lodu,
	2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);	101	Umalulu, Kota Waingapu, Kahaungu Eti
	3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);	73	Umalulu, Pahunga Lodu, Pandawai
	4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	58	Kota waingapu, Umalulu, Pahung Lodu, Pandawai
	5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;	326	Kahaungu Eti, Pahunga Lodu, Nggaha Ori Angu, Mahu, Pandawai, Umalulu, Kambera, Lewa Tidahu,
	6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);	0	
	7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang	5	Kambera, Kota Waingapu
Keamanan	1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;	10	Umalalu
	2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan.	6	Umalulu
	3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	0	
Politik Uang	1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai	5	Pahunga Lodu

	ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;		
Politisasi SARA	1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.	0	
Netralitas	1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	1	Pahunga Lodu
	2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.	10	Pahunga Lodu
Logistik	1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;	3	Umalulu
	2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;	6	Pahunga Lodu
	3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.	1	Pahunga Lodu
Lokasi TPS	1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	22	Kahaungu Eti, Karera, Umalulu
	2. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);	8	Kahaungu Eti, Kota Waingapu
	3. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;	1	Pinu Pahar
	4. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	1	Kahaungu Eti
	5. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	5	Umalulu
Jaringan Internet dan Listrik	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;	164	Pandawai, Karera, Rindi, Matawai La pawu, Pahunga Lodu, Nggaha Ori Angu
	2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	135	Matawai La Pawu, Kahaungu Eti, Nggaha Ori Angu, Paberiwai, Umalulu, Pandawai